

Volume 4 | No.2 | Edisi : Juli - Desember 2015

# JURNAL

# *Kompetitif*



**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG**

Kompetitif

Vol. 4

No. 2

Hal: 1- 149

Palembang, Juli 2015

ISSN: 2302 - 4585

# KOMPETITIF

---

## Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang

---

### Dewan Redaksi

- Pelindung : Dr. Ir. Hj. Manisah, MP ( Rektor )
- Pembina : Syaiful Sahri,SE.MSi (Dekan Fakultas Ekonomi)  
Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, SE.,M.M
- Pimpinan Umum : Hj.Nina Fitriana, SE.,M.Si
- Ketua Penyunting : Msy.Mikial,SE.,Ak.,M.Si.CA
- Penyunting Ahli : Prof. Dr. H. Masngudi, APU ( Universitas Borobudur)  
Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, SE.,M.M (UTP)  
Prof. Dr. H.Taufiq Marwah, SE.,M.Si (Universitas Sriwijaya)  
Prof. Dr. Kamaluddin,SE.,M.M (Universitas Bengkulu)  
Dr. Helmi Yazid,SE.,M.Si (Univ. Sultan Ageng Tirtayasa)
- Penyunting Pelaksana : Sugiri Dinah, SE.,M.Si, Amrillah Azrin,SE.MM,  
Lusia Nargis, SE.,M.Si, Rizal Effendi,SE.MSi
- Sekretariat : Muhammad Said, SE.MSi (Pembantu Umum)  
: Ernawati.SE.Ak MM (Keuangan)  
: Yun Suprani,SE.MSi (Administrasi)
- Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang
- Alamat Redaksi : Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang  
Jl. Kapt. Marzuki No.2446 Kamboja Palembang 30129  
Telp. 0711-354654 E-mail : redaksi.fe\_utp@yahoo.co.id

Jurnal “**Kompetitif**” adalah jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dan kajian analisis kritis dalam bidang manajemen, akuntansi dan perbankan. Jurnal ini terbit 2 (dua) kali dalam setahun (Januari, Juli) dan bertujuan untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian dan kajian analisis kritis dalam bidang manajemen, akuntansi dan perbankan kepada masyarakat ilmiah.

# KOMPETITIF

---

## Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang

---

Analisa Z Score Sebagai Prediktor Kebangkrutan Perusahaan dan Profitabilitas Pada Industri Jasa Sub Sektor Transportasi Di Bursa Efek Indonesia

Mariyam Zanariyah, SE.MM 1 - 22

Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kepuasan Konsumen Terhadap Kopi Bubuk Di Kota Palembang

Lusia Nargis, SE.MSi 23 - 31

Implementasi akuntansi sosial dan lingkungan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan pada pt. Pertamina (persero) marketing operation region ii palembang

Msy Mikial, SE.Ak.MSi, CA 32 - 48

Analisis Strategi Pemasaran Jasa Pariwisata Pada PT Raden Gempita Wisata Tour dan Travel Palembang

Nina Fitriana, SE.MSi, Noviarni, SE.MSi 49 - 61

Analisis Perubahan Pola Konsumsi Rumah Tangga : Dampak Perubahan Harga BBM ( Studi Kasus Kecamatan Kemuning Palembang)

Muhammad Said, SE.MSi 62 - 74

Pengaruh sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Prilaku Terhadap Intensi Kewirausahaan Mahasiswa PTS Di Palembang

Yun Suprani, SE.MSi 75 - 89

Analisis Pengaruh Resiko Manipulasi Earnings Dan Resiko Corporate Governance Terhadap Perencanaan Audit Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Palembang

Sonang PP, SE.MM 90 - 106

Pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT.Sekawan kontrindo Palembang.

Firdaus Sianipar, SE.MM 107 - 119

Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Bank BPR Sindang Bina Harta Lubuk Linggau

Herman Efrizal, SE.MM 120 - 129

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syari'ah Dengan Menggunakan Pendekatan Laba Rugi Dan Nilai Tambah (Studi Kasus Pada Bank Mega Syari'ah Tahun 2010-2013)

Mardiah Kenamon 130 - 144

## IMPLEMENTASI AKUNTANSI SOSIAL DAN LINGKUNGAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PT. PERTAMINA (PERSERO) MARKETING OPERATION REGION II PALEMBANG

Msy. Mikial\*)  
Lailatul Qodriyah\*)

---

### ABSTRACT

*This study basically discusses the implementation of the Social and Environmental Accounting as a Corporate Social Responsibility at PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II Palembang. The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of the Social and Environmental Accounting as a Corporate Social Responsibility at PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II Palembang.*

*Implementation of corporate social responsibility, Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II Palembang can be said has been good to be divided into two usage. For the Partnership Program and Community Development made Statements of Financial Position and separate Program Activity Report with the Financial Statements of the Company. For its Corporate Social Responsibility (CSR), Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II Palembang seen from the post Expense Community Development (ComDev) in the Income Statement are classified in the Other Expenses. PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II Palembang also reveal the activities of social responsibility that a Sustainability Report in narrative form, because it's social responsibility does not have control of the company and indeed the position is outside the company's operations, and not has a significant influence on the company for the purpose of PT. Pertamina (Persero) carry out its social responsibility is to meet the existing regulations, to improve the image, quality and productivity, reduce the cost of risk on the company's operations, lowering stress, and increase customer loyalty.*

**Keyword : Social and Environmental Accounting, Corporate Social Responsibility**

### A. PENDAHULUAN

Kekuasaan yang terpusat pada bisnis modern semakin memperlihatkan bahwa setiap tindakan yang diambil perusahaan membawa dampak yang nyata terhadap masyarakat. Hal ini menyebabkan perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial yang sangat besar terhadap lingkungannya.

Menurut Wibisono (2007: 57) tanggung jawab sosial perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi (menghasilkan keuntungan demi kelangsungan usaha) melainkan juga tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Dunia usaha tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berlandaskan pada *single bottom lines*,

---

\*) Dosen Fakultas Ekonomi UTP

yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja, namun perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan.

Tanggung jawab sosial perusahaan secara singkat dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan atau *stakeholder*. *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan yang saat ini mempunyai peranan yang cukup penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Besarnya dampak *externalities* (*social cost*) terhadap kehidupan masyarakat, masyarakat pun menginginkan agar dampak ini dikontrol sehingga dampak negatif, *external diseconomy* atau *social cost* yang ditimbulkannya tidak semakin besar.

Akuntansi sosial atau akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan alat yang sangat berguna bagi perusahaan dalam mengungkapkan aktivitas sosialnya di dalam laporan keuangan. Pengungkapan melalui *social*

*reporting disclosure* akan membantu pemakai laporan keuangan untuk menganalisis sejauh mana perhatian dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjalankan bisnis. Di Indonesia bentuk akuntansi ini belum mempunyai format atau standar yang baku sehingga pelaporannya bersifat *voluntary* (sukarela). Pengelompokan, pengukuran, dan pelaporan juga belum diatur, jadi untuk pelaporan tanggung jawab sosial diserahkan pada masing-masing perusahaan.

Seiring dengan berkembangnya ilmu akuntansi sosial, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diterbitkan dan mewajibkan perseroan yang bidang usahanya terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang tersebut (Pasal 66 ayat 2c) mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan. Pelaporan tersebut merupakan pencerminan dari perlunya akuntabilitas perseroan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga para *stakeholders* dapat menilai

pelaksanaan kegiatan tersebut. CSR dalam undang-undang tersebut (Pasal 1 ayat 3) dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diartikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Melihat pentingnya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dalam membantu perusahaan menciptakan citra positifnya maka perusahaan seharusnya melihat *Corporate Social Responsibility* bukan sebagai sentra biaya (*cost center*) melainkan sebagai sentra laba (*profit center*) di masa mendatang. Logikanya sederhana, jika *Corporate Social Responsibility* diabaikan kemudian terjadi insiden, maka biaya yang dikeluarkan untuk biaya *recovery* bisa jadi lebih besar dibandingkan biaya yang ingin dihemat melalui peniadaan *Corporate Social Responsibility* itu sendiri. Hal ini belum termasuk pada resiko non-finansial yang berupa memburuknya citra perusahaan di mata publiknya (Wibisono, 2007).

PT Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara

yang kegiatan operasinya bergerak di Industri Minyak dan Gas. Sebagai salah satu BUMN besar di Indonesia PT Pertamina (Persero) berkewajiban untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan melalui *corporate social responsibility* (CSR) berdasarkan perintah Undang Undang No. 40 Tahun 2007 serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 05-MBU/2007.

Dalam dukungannya terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), CSR dan PKBL PT Pertamina (Persero) bergandengan dengan fungsi lain, khususnya di daerah sekitar operasional PT Pertamina dan seluruh wilayah Indonesia pada umumnya. Tujuh kebijakan bantuan Bina Lingkungan yang diarahkan seperti bantuan bencana alam, pendidikan dan pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan sarana & prasarana umum, bantuan tempat ibadah, bantuan pelestarian alam, serta bantuan pengentasan kemiskinan, telah disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Pelaksanaan pelaporan aktivitas tanggung jawab sosial ini dilaporkan sebagai biaya didalam laporan tahunan perusahaan maupun dalam catatan atas

laporan keuangan. Kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilaporkan sebagai biaya operasional perusahaan dimana sumber dananya berasal dari perkiraan laba bersih perusahaan, sedangkan untuk biaya program kemitraan dan bina lingkungan memiliki akun terpisah dari biaya operasional perusahaan karena sumber dananya juga berbeda yaitu dari laba bersih setelah pajak

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengangkat judul “ **Implementasi Akuntansi Sosial dan Lingkungan sebagai Tanggung Jawab Sosial perusahaan pada PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II Palembang** ”

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya dan juga pengamatan yang telah dilakukan pada fungsi *Coorporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pertamina (Persero), maka permasalahan yang akan dibahas adalah : Bagaimanakah implementasi akuntansi sosial dan lingkungan terhadap tanggung jawab sosial berupa kegiatan CSR dan PKBL pada PT Pertamina (Persero) MOR II Palembang.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi akuntansi sosial dan lingkungan terhadap tanggung jawab sosial berupa kegiatan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT Pertamina (Persero) MOR II Palembang

### **Konsep Social Economic Accounting (SEA)**

Konsep akuntansi sosial lingkungan sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa. Pesatnya perkembangan konsep ini didasarkan pada banyaknya tekanan dari lembaga-lembaga bukan pemerintah (*non-goverment*), serta meningkatnya kesadaran lingkungan dikalangan masyarakat luas yang mendesak agar perusahaan-perusahaan menerapkan pengelolaan lingkungan bukan hanya kegiatan industri dan bisnis saja

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011: 403) Pelaksanaan *Socio Economic Accounting* ini akan semakin cepat oleh beberapa tekanan atau faktor antara lain :

- 1) Adanya Peraturan Pemerintah atau UU yang diberlakukan

- 2) Ditetapkannya standar akuntansi yang mengharuskan pengungkapan tanggung jawab sosial
- 3) Adanya tekanan dari *pressure group* misalnya *Greenpeace*, *Trade Union*, PBB, dan lain sebagainya

Akuntansi pertanggungjawaban sosial ekonomi dan lingkungan berada dalam koridor akuntansi keuangan. Bentuk akuntansi pertanggungjawaban sosial selama ini dikenal dengan istilah *corporate social responsibility (CSR)* dan *sustainability reporting (SR)*. Laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat dilaporkan pada *annual report* atau sebagai laporan terpisah dari *annual report*. Akuntansi CSR dan SR menjadi perhatian perusahaan sesuai dengan teori legitimasi dimana perusahaan berusaha untuk memenuhi harapan berbagai pihak yang terkait dalam upaya mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.

Tujuan dari akuntansi sosial lingkungan adalah untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka yang memerlukan atau dapat menggunakannya. Keberhasilan akuntansi lingkungan tidak hanya tergantung pada ketetapan dalam menggolongkan semua biaya-biaya yang dibuat perusahaan, akan tetapi keakuratan dan kemampuan data akuntansi perusahaan dalam menekan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan

### **Pengertian *Corporate Social Responsibility (CSR)***

*World Business Council on Sustainable Development* dalam Muh. Arief (2009 :107)

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah “suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika berperilaku dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*)”. Menurut Ismail Solihin (2009:25) CSR adalah “basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat setempat. Secara teoritik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para *stakeholdernya*, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah operasinya”.

### **Pengertian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)**

Menurut Muh. Arief (2009 : 78) Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sementara yang dimaksud dengan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui



pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

## B. METODE PENELITIAN

### Populasi, Sampel dan Sampling

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Aktivitas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dijalankan oleh PT Pertamina (Persero) yaitu berupa kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilaksanakan mulai dari Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2015.

Dalam penelitian ini sampelnya adalah penerapan (pengungkapan, penyajian dan pelaporan) akuntansi sosial ekonomi terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa kegiatan *coporate social responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL) selama 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.

Adapun metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode penarikan secara tidak acak (*purposive sampling*), yaitu penulis dengan sengaja menentukan sampel yang dipilih sehingga dapat mencerminkan informasi yang dipilih mengenai perlakuan akuntansi terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.

### Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan rancangan penelitiannya adalah deskriptif komparatif yaitu membandingkan antara teori yang berhubungan dengan penerapan akuntansi sosial ekonomi terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan kondisi yang terjadi di perusahaan.

### Variabel dan Definisi Operasional

**Tabel 1**  
**Variabel dan Definisi Operasional**

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1	Akuntansi Sosial	Pengertian Akuntansi Sosial menyangkut peraturan, pengukuran analisis, pengungkapan pengaruh sosial dari kegiatan pemerintah dan pengusaha. Hal ini termasuk kegiatan yang bersifat mikro dan makro.	Pelaporan aktivitas tanggung jawab sosial dalam laporan keuangan maupun laporan tahunan perusahann
2	Tanggung Jawab Sosial	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan wujud	1. Penyaluran bantuan untuk masyarakat Ring

	dan Lingkungan	tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk Corporate Sosial Responsibility (CSR) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Operasi Perusahaan untuk Program CSR</li> <li>2. Penyaluran Pinjaman dana bergulir kepada UKM untuk Program Kemitraan dan bantuan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat untuk Bina Lingkungan</li> </ol>
--	----------------	---	--

**Teknik Analisis**

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

**C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

Dalam laporan keuangan utama PT Pertamina (Persero) memang tidak ada laporan tambahan yang khusus berkenaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan tidak ada pula penjabaran serta penjelasan khusus terkait tanggung jawab sosial pada bagian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Berdasarkan regulasi aktifitas tanggung jawab sosial PT Pertamina (Persero) dilaporkan atau terkandung dalam tiga bentuk laporan yaitu sebagai berikut :

**1. Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)**

Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ini disusun terpisah dari laporan keuangan utama perusahaan. Untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dibuat Laporan Posisi Keuangan PKBL dan Laporan Aktivitas yang terpisah dari Laporan Posisi Keuangan utama Perusahaan.

**2. Laporan Keuangan Utama Perusahaan (*financial statement*)**

Berdasarkan hasil observasi komponen tanggung jawab sosial PT Pertamina (Persero) diketahui terdapat dalam pos akun Beban ComDev (*Community Development*) pada Laporan Laba Rugi.

**3. Laporan Keberlanjutan Perusahaan (*Sustainability Report*)**

Selain informasi tanggung jawab sosial yang terdapat dalam laporan laba

rugi sebagai pos beban ComDev, PT Pertamina (Persero) juga menerbitkan *sustainability report*. Informasi tanggung jawab sosial ini disajikan terpisah dari laporan keuangan utama perusahaan sebagai bentuk pelaksanaan regulasi sebagai perseroan berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### **Pembahasan**

PT. Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang dituntut melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Oleh karena itu laporan Program tersebut dibuat terpisah dari laporan keuangan utama yang memang khusus untuk operasional perusahaan. Hal ini senada dengan pernyataan saudara Ahmad Fathurroji selaku *Junior Analyst* PT Pertamina (Persero) yang mengatakan, "*Laporan PKBL dibuat terpisah dari laporan keuangan perusahaan, standar yang dipakai juga beda. Untuk PKBL dasarnya Peraturan Menteri menggunakan SAK ETAP dan PSAK 45 untuk entitas nirlaba, karena Program itu kan untuk BUMN, jadi dilihat dari sudut pandang Pertamina sebagai BUMN, bukan perseroan yang orientasinya bisnis. Sifat dari*

*pertanggungjawabannya juga hanya sebatas pemenuhan regulasi, dimana membuktikan bahwa Pertamina sudah melaksanakan hal tersebut.*" Sehingga jelaslah bahwa Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan suatu bentuk perwujudan dari kepatuhan PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN dalam menerapkan regulasi yang mengaturnya untuk melakukan tanggung jawab sosial.

Untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II Palembang sebagai bentuk ketaatan terhadap regulasi BUMN, dibuat Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas Program yang terpisah dengan Laporan Keuangan Utama Perusahaan. Laporan disusun dengan basis akrual dan menggunakan dasar Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (PSAK 45 Revisi 2011). Hal ini karena pertanggungjawaban program hanya diperuntukkan bagi pihak intern hanya sebatas penilaian kinerja pelaksana operasional dalam merealisasikan anggaran.

Informasi yang mampu menunjukkan telah dilakukannya tanggung jawab sosial oleh PT Pertamina (Persero) dalam Laporan Keuangan Utama Perusahaan dapat kita lihat pada Laporan Laba-Rugi Perusahaan. Dalam Laporan tersebut terdapat sebuah pos atau akun yang bernama ComDev (*Community Development*). Akun ComDev ini merupakan akun atas beban yang dikeluarkan perseroan atas tanggung jawab sosialnya. Sebagai BUMN PT Pertamina (Persero) melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan program tanggung jawab sosial yang informasi bebannya tercatat dalam akun Beban ComDev ini bernama Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L). Beban ComDev ini diklasifikasikan ke dalam Beban Lain-lain, karena dianggap beban diluar operasional.

PT Pertamina (Persero) juga telah membuat dan menerbitkan *Sustainability Report* tersebut. Namun laporan tersebut tidak disusun oleh tiap-tiap unit atau kantor area. Penyusunan *Sustainability Report* PT Pertamina (Persero) tahun 2014 dilakukan secara terpusat. Dasar penyusunan yang

digunakan adalah GRI (*Global Reporting Initiative*).

Berikut hasil analisis laporan keberlanjutan PT Pertamina (Persero) tahun 2014 dengan membandingkan pada indikator Standar Pengungkapan GRI sebagai berikut :

#### 1. Profile

##### a. *Strategy and Analysis* (strategi dan analisis)

Informasi ini telah tercantum dalam laporan keberlanjutan PT Pertamina (Persero) pada bagian Profil PT Pertamina (Persero) - Strategi Umum Perusahaan. Disebutkan bahwa keberlanjutan usaha perusahaan bergantung pada tiga pilar utama: kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Kinerja ekonomi yang stabil menjamin keberlanjutan usaha dalam menyediakan investasi. Kinerja lingkungan akan memastikan seluruh aktivitas operasional mengurangi bahkan meniadakan kerusakan lingkungan. Sedangkan kinerja sosial menunjukkan pertanggungjawaban sosial perseroan dalam memastikan seluruh aktivitas perseroan selain meningkatkan nilai perusahaan sekaligus memberi manfaat bagi

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dikatakan bahwa ketiga pilar ini merupakan satu kesatuan yang perlu dicapai oleh perseroan untuk memastikan keberlanjutan usaha perseroan selama mungkin. Dalam *sustainability report* juga dipaparkan dampak, risiko dan peluang usaha. Dikatakan bahwa dampak utama yang paling nyata bagi perseroan adalah kasus pencurian minyak.

b. *Organizational Profile* (profil organisasi)

Dalam laporan keberlanjutan PT. PERTAMINA (Persero) telah disebutkan beberapa informasi Profil Perusahaan, mulai dari Nama Organisasi, Merek/Produk/Jasa Utama, Struktur Organisasi, Lokasi Kantor Pusat, Sifat Kepemilikan dan Bentuk Legal, Skala Organisasi, dan informasi lainnya yang relevan. Berikut merupakan informasi dalam *sustainability report* yang berkenaan dengan indikator ini kantor pusat PT. PERTAMINA (persero) berlokasi di Jl. Medan Merdeka Timur No. 1 A Jakarta Pusat 1010. PERTAMINA merupakan Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan sebagai perusahaan minyak dan energi terbesar untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Perseroan merupakan BUMN dengan badan hukum berbentuk persero bersifat terbuka, namun sahamnya tidak terdaftar dan tidak diperdagangkan di pasar saham Bursa Efek Indonesia. Seluruh saham perseroan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

c. *Report Parameters* (parameter laporan)

Parameter pelaporan dalam hal ini terdapat tiga parameter yaitu periode pelaporan, tanggal pelaporan sebelumnya yang paling baru, dan siklus pelaporan. Semua informasi ini telah tercantum pada bagian Tentang Laporan Keberlanjutan PT Pertamina (Persero) disebutkan bahwa Laporan Keberlanjutan ini meski dibuat terpisah namun tidak dapat dipisahkan dari laporan kinerja perusahaan selama satu tahun operasional yang disajikan dalam bentuk Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero).

d. *Governance, Commitments, and Engagement* (tata kelola, komitmen, dan keterlibatan)

Struktur tata kelola organisasi, termasuk komite di bawah badan pengelola tertinggi yang bertanggung jawab untuk tugas khusus, seperti dalam menetapkan strategi atau mekanisme pengawasan organisasi telah dipaparkan secara lengkap dalam Laporan Keberlanjutan pada bagian Tata Kelola Berkelanjutan. Dalam *sustainability report* dijelaskan Dalam struktur tata kelola perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan lembaga tertinggi. RUPS merupakan forum para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dan didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan. RUPS terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Melalui RUPST maupun RUPSLB, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya dalam mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris maupun Direksi

sekaligus memberikan pendapat dan suaranya untuk mengambil keputusan penting secara independen dan seimbang antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan perusahaan.

## 2. Performance Indicators

### a. *Environmental* (Indikator Kinerja Lingkungan)

Aspek dalam indikator ini adalah Aspek Material, Aspek Energi, Aspek Air, Aspek Biodiversitas/keanekaragaman hayati, Aspek Emisi dan Limbah, Aspek Kepatuhan serta Aspek Pengangkutan/Transportasi. Aspek material terdiri dari penggunaan bahan yang diperinci berdasarkan berat atau volume dan prosentase penggunaan bahan daur ulang. Aspek Energi berkaitan dengan penggunaan energi baik langsung maupun tidak langsung dari sumber daya energi primer, penghematan dan inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi. Kemudian Aspek Kepatuhan berkaitan dengan nilai yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan. Sedangkan Aspek Pengangkutan berkenaan dengan

dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan. Semua aspek tersebut telah terperinci dalam Laporan Keberlanjutan PT Pertamina (Persero) pada bagian Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan.

b. *Product Responsibility* (Indikator Kinerja Tanggung Jawab Produk)

Informasi yang disajikan pada bagian ini meliputi program-program termasuk kerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan atau memelihara aset vital negara dan layanan kepada pelanggan serta pengawasan keterbukaan tentang informasi yang spesifik mengenai ketenagalistrikan.

c. *Economic* (Indikator Kinerja Ekonomi)

Informasi yang tersaji pada bagian ini antara lain adalah perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung yang meliputi pendapatan, biaya operasi, jasa karyawan, donasi dan lainnya. Informasi mengenai indikator ekonomi ini dalam Laporan Keberlanjutan PT. PERTAMINA

tersaji pada bagian Kinerja Ekonomi.

d. *Human Rights* (Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia)

Indikator ini meliputi jumlah waktu bagi karyawan dalam hal kebijakan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk presentase karyawan yang telah menjalani pelatihan. Selain itu juga segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang teridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut. Semua informasi terkait telah disajikan pada bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia. Disebutkan bahwa Pertamina menjamin persamaan kesempatan bagi seluruh pegawai dalam mengembangkan karirnya sesuai kompetensi dan perkembangan perusahaan. Kompetensi dan kemampuan pegawai dinilai menurut *tools "balanced scorecard"* untuk menjamin akurasi dan kesetaraan. Penerapan yang konsisten atas asas ini menjadikan tidak adanya lagi kasus diskriminasi yang

berkaitan dengan suku, ras, agama dan *gender* pada semua level jabatan di Perseroan .

e. *Labour Practice and Decent Work Performance Indicators* (Praktik Tenaga

Kerja dan Pekerjaan yang Layak)

Pada bagian ini informasi yang disajikan berkaitan dengan tenaga kerja perusahaan mulai dari program dan proses untuk menjamin ketersediaan tenaga terampil, presentase jumlah tenaga kerja yang akan pensiun 5 dan 10 tahun mendatang, kebijakan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, jumlah dan tingkat perputaran karyawan, serta presentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur. Semua informasi tersebut telah tersaji di Laporan Keberlanjutan pada PT Pertamina (Pesero) bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan LK3 (lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja). Telah dinyatakan bahwa untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja yang trampil dalam proses perekrutan, PERTAMINA menyelenggarakan *Direct Shopping* dan *Job Fair* yang

bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi yang terbagi dalam 3 kelompok kegiatan rekrutmen yaitu: (i) rekrutmen BPS (Bimbingan Praktis Sarjana) (ii) rekrutmen program D3 BPA (Bimbingan Praktis Ahli (iii) rekrutmen SMA operator kilang. Selain itu, PERTAMINA juga menyelenggarakan program beasiswa ikatan dinas dan *daily online application*. Proses rekrutmen kemudian ditindaklanjuti berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai baru maupun pegawai lama. Batasan usia pensiun PT PERTAMINA (Persero) adalah 56 tahun.

f. *Society* (Indikator Kinerja Masyarakat)

Beberapa informasi terkait adalah mengenai keterbukaan terhadap masyarakat untuk sektor listrik dan utilitas, sifat dasar, ruang lingkup dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat baik pada saat memulai, saat beroperasi dan saat mengakhiri. PT. Pertamina (Persero) telah menyajikan



informasi tersebut dalam Laporan Keberlanjutannya pada bagian Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan. PERTAMINA telah menyusun program pemberdayaan masyarakat adat (*community development action plan/CDAP*) yang berisi program-program pemberdayaan masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial Pertamina

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **Simpulan**

Dari pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi tanggung jawab sosial PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II Palembang bisa dikatakan sudah baik dengan dibedakan menjadi dua penggunaan. Untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II Palembang sebagai bentuk ketaatan terhadap regulasi BUMN, dibuat Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas Program yang terpisah dengan

Laporan Keuangan Utama Perusahaan. Sedangkan untuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II Palembang yang berupa Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (P3L) dimana sebagai bentuk kepatuhan perseroan dalam memenuhi UU no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Dilaksanakannya tanggung jawab sosial PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II Palembang terlihat dari adanya pos Beban *Community Development* (ComDev) pada Laporan Laba-Rugi yang digolongkan pada bagian Beban Lain-lain. Diakui sebagai beban karena dianggap tidak memiliki nilai ekonomis kedepannya dan merupakan pengeluaran diluar operasi utama perusahaan, sehingga murni untuk program tanggung jawab sosialnya.

2. Selain dilaporkan dalam bentuk Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas yang terpisah dari Laporan Keuangan utama perusahaan serta tercantum sebagai

Beban dalam Laporan Laba Rugi Perusahaan, PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II Palembang juga mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosialnya itu dalam sebuah Laporan Keberlanjutan (*sustainability report*). Laporan Keberlanjutan tersebut disusun oleh Kantor Pusat PT. Pertamina (Persero) di Jakarta. Laporan tersebut telah mengacu pada GRI dimana telah memenuhi semua indikator unsur pelaporan.

3. Apabila dilihat dari sudut pandang batasan pelaporan, informasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam Laporan Keberlanjutan PT Pertamina (Persero) dilaporkan dalam bentuk narasi, karena memang tanggung jawab sosial tersebut tidak memiliki kendali terhadap perusahaan dan memang posisinya berada di luar operasional perusahaan, serta tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan karena tujuan PT. Pertamina (Persero) melaksanakan tanggung jawab sosialnya adalah untuk memenuhi regulasi yang ada, memperbaiki citra, mutu dan produktivitas, mengurangi biaya risiko atas

operasi perusahaan, menurunkan tekanan, serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Walaupun tidak memiliki pengaruh signifikan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat berdampak jangka panjang signifikan diantaranya adalah dengan meningkatnya taraf hidup sebagai dampak bantuan dari perusahaan seiring dengan meningkatnya loyalitas dan kesepahaman masyarakat dengan proses operasi PT. Pertamina (Persero) akan meningkatkan penjualan bahan bakar nonsubsidi dan pelumas. Sehingga dalam jangka panjang akan berdampak pada profitabilitas perusahaan. Hal ini sesuai dengan Batasan Pelaporan pada GRI ketika informasi yang diungkapkan tidak memiliki pengaruh dan dampak signifikan maka cukup disajikan dalam bentuk narasi, lebih jelas terkait kebijakan terkait keputusan atas penetapan dana tanggung jawab sosial dan pemilihan program tanggung jawab sosial perusahaan.

#### **Saran - Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis mencoba memberi saran yang sekiranya bermanfaat yaitu:

1. Disarankan agar perusahaan tetap membuat laporan terpisah mengenai realisasi kegiatan agar lebih mudah mengevaluasi kegiatan atau program yang berjalan serta berguna untuk pertimbangan program yang akan dilaksanakan.
2. Untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti di bidang tanggung jawab sosial, disarankan lebih mengarah kepada implementasi dari tanggung jawab sosial dengan didukung disiplin ilmu lain baik segi hukum, hukum lingkungan maupun ekonomi lingkungan, agar penilaian terhadap implementasi yang berjalan bisa lebih baik. Misalnya apakah yang menjadi pertimbangan bagian Komunikasi, Hukum dan Administrasi (KHA) perusahaan dalam membuat program tanggung jawab sosial dari segi Hukum.
3. Dikarenakan belum ada standar baku yang mengatur pelaporan tanggung jawab sosial bagi perusahaan, disarankan untuk penelitian selanjutnya tetap menggunakan obyek perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas pertimbangan, sebagai BUMN tentu harus mengikuti pedoman yang telah

ditetapkan pemerintah, yang menjadi berbeda hanya bagaimana kebijakan perlakuan akuntansi untuk biaya sosial dari sudut pandang sebagai perseroan. Dimana hal tersebut tergantung dari jenis kegiatan industri, teknologi dan kebijakan perusahaan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Achmad Sonhadji, 1989 *Akuntansi Sosial : Perananya dalam mengukur tanggung jawab social perusahaan, suatu tinjauan analitis*, majalah akuntansi, no. 10 bulan Oktober
- Adam, Carol, A, et.al .1997. *Coorporate Sosial Reporting Practices in Western Europe :Legitimizing Corporate behavior, Working Paper, Departement of Accounting and Finance, University of Glasglow, England.*
- Adams, Carol A, 2004 , *The ethical, social and environmental reporting performance portrayal , Accounting, Auditing & Accountability Journal* Vol. 17 No. 5,
- Carroll, Archie B., 1979. *The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Towards the Moral Management of Organisation Stakeholders,*

Business Horizon, July-August.[5].

*Environmental Accounting Guidelines*  
2005 February 2005 Ministry of  
the Environment JAPAN

Ikhsan, Arfan dan Muhammad Ishak.  
2005. *Akuntansi Keperilakuan*.  
Salemba Empat: Jakarta

Harahap Sofyan Safri, 1988, *Sosio  
Economic Accounting (SEA) :  
Menyoroti etika dan tanggung  
jawab social perusahaan*,  
Majalah Akuntansi No. 3  
bulan Maret

Rochmi, Naili. 2007. *Pengaruh Kondisi  
Sosial Politik dan Mekanisme  
"Islamic Governance" Terhadap  
Pengungkapan  
Pertanggungjawaban Sosial*.

Semarang: Fakultas Ekonomika  
dan Bisnis Universitas  
Diponegoro.

Marzully Nur dan Denies Priantinah,  
*Analisis Faktor-faktor yang  
Mempengaruhi Pengungkapan  
Coorporate Social Responsibility  
Di Indonesia (Studi Empiris pada  
Perusahaan Berkategori High  
Profile yang Listing di Bursa Efek  
Indonesia)* Jurnal Nominal /  
Volume I Nomor I / Tahun 2012

Suwaldiman, 2000, *Pentingnya  
Pertanggungjawaban Sosial  
Perusahaan dalam Penetapan  
Tujuan Pelaporan Keuangan  
dalam Conceptual Framework  
Pelaporan Keuangan  
Indonesia*, JAAI, Vol.4 No. 1  
Juni, Yogyakarta, UII Press.